DIPLOMASI INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2015-2019

Oleh : Silvia Rahmadani
(silviaramadhani2426@gmail.com)
Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel
Bibliografi : 14 buku, 25 Jurnal, 42 Website
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research explains Indonesia's diplomacy in the South Pacific region during the period of Joko Widodo (Jokowi) in 2015-2019. Geographical proximity and the existence of cultural similarities make the South Pacific region has an important meaning in Indonesian geopolitics. In addition, Indonesia has a national interest to protect the sovereignty of the Republic of Indonesia regarding the issue of Papuan separatism which is a concern in the region.

The research method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through document analysis. The level of analysis used in this research is the level of system analysis. This research uses the theory of The Adaptive Model in analyzing foreign policy carried out by Jokowi.

Based on the research results obtained, it can be concluded that Jokowi approached the South Pacific region as an adaptive action to protect the sovereignty of the Republic of Indonesia from the support of South Pacific countries for Papuan independence. External changes that occurred in the South Pacific forced Jokowi to adjust foreign policy to defend Indonesia's national interests (Acquiscent Adaptation). Jokowi implements a policy of Looking East and uses economic diplomacy and cultural diplomacy to build good relations between Indonesia and the South Pacific region.

Keywords: Diplomacy, Indonesia, South Pacific Region, Foreign Policy, Separatism.

PENDAHULUAN

Kawasan Pasifik Selatan merupakan wilayah pesisir benua Asia yang terbagi menjadi tiga bagian wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda yaitu Polinesia, Mikronesia dan Melanesia. 5 Provinsi Indonesia memiliki kesamaan dengan budaya Melanesia yaitu Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat. Selain itu wilayah Pasifik Selatan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di bagian timur yaitu melalui provinsi Papua Barat dengan Papua Nugini.

Kedekatan geografis antara Indonesia dengan Pasifik Selatan tentunya mempunyai pengaruh yang besar bagi Indonesia. Kesamaan kondisi geografis yaitu negara kepulauan, permasalahan negara berkembang, tantangan menghadapi perekonomian global serta masalah di bidang pembangunan. Karena hal ini maka terdapat banyak permasalahan serta kesamaan kepentingan yang dapat diperjuangkan bersama, seperti isu perubahan iklim yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara Pasifik Selatan.

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2016, wilayah Pasifik Selatan termasuk wilayah yang rentan terkena bencana alam dan dampak perubahan iklim dunia[1]. Isu pemanasan global yang saat ini menjadi perhatian masyarakat global secara nyata mengancam negara-negara Pasifik Selatan. Pulau-pulau dengan wilayah yang kecil dan dataran yang rendah terancam tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Ahli berpendapat bahwa akan ada ribuan pulau kecil serta ribuan rumah di seluruh bagian pesisir Indonesia akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut menjelang tahun 2050.[2] Dengan kondisi geografis yang sama hal ini tentunya menjadi tantangan yang dapat diperjuangkan bersama bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan.

Adanya citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik Selatan membuat hubungan luar negeri Indonesia dan kawasan ini tidak begitu baik. Kasus pelanggaran HAM masa lalu di Timor-timur dan permasalahan separatism Papua Barat yang tidak kunjung selesai hingga saat ini menyebabkan pandangan buruk dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk Indonesia. Bahkan saat ini terjadi peningkatan dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan untuk kelompok separatism di Papua Barat. Kelompok separatism Papua Barat yang saat ini memperluas

[1] Worldbank, *Climate Change and Disaster Management.* Washington: The World Bank 2016. Hlm.16

[2] The Jakarta Post. "Rising Sea Levels Threaten 2000 Islands in Indonesia". 17 Desember 2015 http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/17/rising-sea-levels-threaten-2000-islands-indonesia.html

pergerakannya hingga ke luar negeri terutama di kawasan Pasifik Selatan untuk mendapatkan simpati internasional sangat berbahaya bagi Indonesia, Indonesia dapat kehilangan teritorialnya apabila kelompok ini mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

KERANGKA TEORI

Metode penelitan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana penulis menganalisa penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data yang sudah tersedia. Penelitian juga menggunakan metode penelitian historis dimana di dalam penelitian penulis banyak memaparkan data-data sejarah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *document analysis*.

Dalam penelitian ini, level analisis yang digunakan penulis adalah *system-level analysis* atau level analisis system. Level analisis sistem ini menjelaskan bagaimana bentuk sistem internasional mempengaruhi tindakan aktor serta bentuk saling keterkaitan yang ada di dalamnya.[3]

Untuk teori, pada penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri "The Adaptive Model" oleh James N. Rosenau. Dalam kebijakan luar negeri perubahan situasi internasional sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Perubahan-perubahan situasi internasional yang dinamis memaksa negara untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Selain itu perubahan-perubahan yang terjadi di lingkup internal serta peran pemimpin juga sangat berpengaruh. Hal ini disebut sebagai The Adaptive Model yaitu kebijakan luar negeri yang diambil menyesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internalnya.[4]

Perubahan-perubahan ini harus dijaga agar tidak mengubah struktur penting dalam masyarakat. Struktur penting masyarakat yaitu pola-pola yang merupakan dasar politik, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat dalam suatu negara. Formulasi kebijakan yang tepat dibutuhkan untuk mempertahankan struktur esensial ini. Apabila struktur internal semakin memberikan tuntutan dan lingkungan eksternal dianggap berpotensi mengancam eksistensi negara maka pemimpin harus beradaptasi untuk mempertahankan negaranya.

Terdapat tiga perubahan dasar yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara yaitu:

1. Perubahan Personel (Internal dan Eksternal)
2. Perubahan Politik (Internal dan Eksternal)
3. Perubahan Sosial-Ekonomi (Internal dan Eksternal)[5]

Dengan perubahan-perubahan ini maka negara akan memberikan

[3] Yessi Olivia. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional". *Jurnal Transnasional*. Vol. 5, No. 1, Juli 2013. Hlm. 899

[4] James N. Rosenau. "Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model." *Comparative Politics*. Vol. 2, No. 3, April 1970. Hlm. 367

[5] *Ibid.,* Hlm. 373-376

tindakan-tindakan adaptif sebagai respon atas perubahan tersebut. Apabila terdapat tuntutan dari internal negara mengenai perubahan kondisi eksternal atau kondisi lingkungan eksternal yang dinilai dapat mengancam eksistensi atau keamanan negara, maka negara tersebut akan memutuskan kebijakan luar negeri sebagai respon dari keadaan tersebut.

PEMBAHASAN

Keterikatan yang sangat erat bagi etnis Melanesia menggiring masyarakat Melanesia kepada satu tujuan utama yaitu membebaskan saudara Melanesia mereka dari belenggu penjajahan, hal ini disebut dengan *Melanesian Way*. *Melanesian Way* menjadi alasan kuat bagi negara-negara Melanesia menunjukkan solidaritas mereka terhadap saudara mereka yang ada di Papua, Indonesia. Sejak awal permasalahan separatism Papua Barat, negara-negara kawasan Pasifik Selatan memberikan perhatian terhadap kasus ini.

Rasa solidaritas yang kuat yang dimiliki masyarakat Pasifik Selatan dengan masyarakat Papua dimanfaatkan oleh tokoh separatism Papua Barat untuk menggalang dukungan. Mereka menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara Pasifik Selatan, menjadikan negara mereka sebagai markas pergerakan dan menyusup ke berbagai organisasi regional yang ada. Permasalahan ini telah menjadi perhatian bagi organisasi sub-regional yang ada di Pasifik Selatan terutama *Pacific Island Forum* (PIF) dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

PACIFIC ISLAND FORUM (PIF)

Pacific Island Forum (PIF) yang sebelumnya bernama South Pacific Forum merupakan sebuah organisasi politik dan ekonomi regional di kawasan Pasifik Selatan. PIF adalah organisasi utama di Pasifik Selatan yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik Selatan. PIF atau Forum Kepulauan Pasifik ini dibentuk atas usulan Selandia Baru pada tahun 1971 bersama negara-negara pendiri lainnya yaitu Australia, Cook Islands, Fiji, Nauru, Tonga dan Samoa.[6] Saat ini terdapat 18 negara yang terintegrasi dalam PIF yaitu Australia, Cook Islands, Federasi Micronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Kepulauan Marsal, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu dan satu negara anggota asosiasi yaitu Tokelau.

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi sub-regional yang mewakili budaya Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. MSG berdiri pada 14 Maret 1988 dengan ditandatanganinya Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia di Port Vila, Vanuatu.[7]

---

[6] "Agreement Establishing Pacific Island Forum" Pacific Islands Forum Secretariat, 07 April 2021, https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-forum/

[7] *Melanesian Spearhead Group* (MSG)," Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, diakses pada 20 Mei 2021 https://kemlu.go.id/portal/i/read/128/hala

Inisiasi pembentukan MSG berawal dari adanya pertemuan non-formal antara pemimpin dari negara-negara melanesia pada 17 Juli 1986. Mereka ialah Perdana Mentri Papua Nugini Paias Wingti, Perdana Mentri Vanuatu Walter Lini dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Yehezkiel Alenia, serta perwakilan dari gerakan pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).[8] Pertemuan ini menjadi awal dari terbentuknya MSG hingga menjadi organisasi seperti saat ini.

DUKUNGAN NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN TERHADAP KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Sejak tahun 2013, kelompok separatism mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama dari egara-negara di kawasan Pasifik Selatan, diantaranya yaitu; Vanuatu, Fiji, Tuvalu, Kiribati, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Nauru, Tonga dan Kepulauan Marshall. Negara-negara ini baik secara langsung menyatakan dukungan diplomatis terhadap penentuan nasib sendiri dari Papua Barat dana tau memberikan dukungan berupa fasilitas kepada kelompok separatism.

Pada forum-forum internasional banyak negara-negara Pasifik Selatan memberikan dukungannya kepada kelompok separatism, menuduh dan memojokkan pemerintah Indonesia dengan berbagai tuduhan seperi pelanggaran HAM, Rasis, bahkan Genosida. Upaya ini terus dilakukan untuk menarik simpati internasional dan mendesak PBB untuk mengambil alih penyelesaian permasalahan ini. Pada pertemuan MSG di Honiara, Kepulauan Solomon 14-16 Juli 2016 aktivis ULMWP bersama mayarakat Kepulauan Solomon melakukan demonstrasi mendukung ULMWP sebagai anggota penuh MSG.[9]

Gambar 1.1: Demonstrasi di Kepulauan Solomon

Papua Nugini yang selama ini mengakui bahwa Papua Barat adalah bagian Indonesia, saat ini berbicara mengenai keperihatinannya terhadap permasalahan Papua. Peter O'neill sebagai PM Papua Nugini mengatakan pada pidato utama di KTT Pemimpin PNG di Port Moresby:

"Sometimes we forget our own families, our own brothers, especially those in West Papua,"

man_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg

[8] "Excelling Together Towards a Progressive and Prosperous Melanesia" Melanesian Spearhead Group Secretariat, diakses pada 20 Mei 2021 https://www.msgsec.info/about-msg/

[9] Jemima Garrett, "Papua New Guinea's prime minister Peter O'Neill vows to speak out against Melanesian 'oppression' in West Papua," *ABC News*,5 Feb 2015 https://www.abc.net.au/news/2015-02-06/png-pm-vows-to-speak-out-against-oppression-in-west-papua/6074572

"... Pictures of brutality of our people appear daily on the social media, and yet we take no notice,"[10]

Pemerintah Papua Nugini telah berbicara mengenai isu Papua Barat. Ia ingin pemerintah Papua meningkatkan perhatian terhadap Papua Barat dan mengajak negara-nrgara Melanesia di Pasifik Selatan bekerja sama menyelesaikan konflik ini.

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun 2016 di New York, Vanuatu kembali menyuarakan keprihatinannya dan meminta referendum bagi masyarakat Papua. Dalam kesempatan pada sidang Dewan HAM PBB ke-34 di Jenewa, Swiss perwakilan Vanuatu berpidato mewakili tujuh negara Pasifik Selatan (Nauru, Tuvalu, Tonga, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall) mendesak PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.[11] Pada tahun 2019, Vanuatu menyelundupkan pemimpin ULMWP Benny Wenda sebagai delegasinya dalam kunjungan kehormatan Vanuatu ke Komisi Tinggi Dewan HAM PBB pada 25 Januari 2019. Benny Wenda menyerahkan petisi yang telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang untuk pengadaan referendum Papua Barat.

Dukungan-dukungan yang diberikan oleh negera-negara Pasifik Selatan terhadap kemerdekaan Papua Barat merupakan salah satu bentuk dari perubahan-perubahan situasi eksternal yang dapat mengancam struktur esensial Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi sebagai pengambil keputusan melakukan pola kebijakan yang menyesuaikan dengan keadaaan eksternal atau yang disebut Rosenau sebagai pola perubahan kebijakan luar negeri *Acquiscent Adaptation*.

INDONESIA'S LOOK EAST POLICY

Dalam mendekatkan diri ke kawasan Pasifik Selatan, Jokowi menerapkan kebijakan *Indonesia's Look East Policy*. Kebijakan *"Indonesia's Look East Policy*" atau kebijakan "Melihat ke Timur" merupakan suatu langkah kebijakan Indonesia untuk mendekatkan diri ke wilayah Pasifik Selatan dengan membuka pintu Timurnya dan meningkatkan bantuan ke negara-negara Pasifik Selatan. Pada dasarnya kebijakan "Melihat ke Timur" merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang memprioritaskan kawasan Pasifik Selatan sebagai mitra kerja sama

[10] Jemima Garrett, "Papua New Guinea's prime minister Peter O'Neill vows to speak out against Melanesian 'oppression' in West Papua," ABC News,5 Feb 2015 https://www.abc.net.au/news/2015-02-06/png-pm-vows-to-speak-out-against-oppression-in-west-papua/6074572

[11] DW.com "7 Negara Pasifik Desak PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Papua" 02 Maret 2017 https://www.dw.com/id/7-negara-pasifik-desak-pbb-selidiki-pelanggaran-ham-di-papua/a-37777030

pembangunan baik secara bilateral, trilateral dan multilateral.[12]

Pada lingkup bilateral, Indonesia mendekati negara-negara Pasifik Selatan dengan menggunakan konsep soft diplomacy. Pemerintahan Jokowi bertindak sebagai negara sahabat bagi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Jokowi meningkatkan kehadiran Indonesia di kawasan tersebut melalui hubungan resmi antar pemerintah dan juga melalui *people to peole contact*.

Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari soft power diplomacy yaitu dengan melakukan kerja sama ekonomi, bantuan kemanusiaan serta menjadikan budaya sebagai instrument diplomasi.

DIPLOMASI EKONOMI

Negara- negara di kawasan Pasifik Selatan mempunyai keadaan ekonomi yang lemah dan tidak stabil. Dengan wilayah yang relative kecil dan kemampuan SDM yang rendah membuat negara-negara ini kesulitan untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Negara-negara di kawasan Paisfik Selatan adalah negara-negara yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki kemampuan ekonomi lebih daripada negara-negara ini untuk dapat meningkatkan kehadirannya di negara-negara Pasifik Selatan. Indonesia dapat melakukan diplomasi ekonomi melalui kerja sama serta bantuan luar negeri kepada negara-negara tersebut.

Berdasarkan rencana strategis 2015-2019 Kementerian Luar Negeri RI masa pemeritahan Jokowi melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu menganggarkan dana untuk meningkatkan bantuan kerja sama teknik demi penguatan citra Indonesia dimata internasional. Kerja sama bantuan teknik dilakukan melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Pada tahun 2019, Indonesia melakukan peresmian “Indonesian AID” atau Indonesian Agency for International Development yaitu Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Jusuf Kalla sebagai wakil presiden kala itu menyampaikan bahwa Indonesia AID merupakan perwujudan dari “diplomasi tangan diatas” yang dilakukan Indonesia. Menlu Retno mengatakan melalu Indonesia AID Indonesia menguatkan peran kerja sama pembangunan internasional, kerja sama selatan-selatan dan triangular, pencapaian SDG’s serta kontribusi

[12] Baiq Wardhani & Vinsensio Dugis, “Interpreting Indonesia’s “Look East” Policy: The Security Dimension of Foreign Aid” *Issues & Studies* Vol. 56 No. 3 hlm. 11

menjaga perdamaian dan kesejahteraan internasional.[13]

Indonesia menyelenggarakan Indonesia South Pacific Forum (ISPF) pada Maret 2019 di Jakarta, Indonesia. ISPF merupakan sebuah forum dialog multilateral antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan. Forum ini dihadiri oleh 14 negara Pasifik Selatan. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi yaitu bidang perdagangan, investasi, kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas diantara negara-negara tersebut. Pada forum ini pengusaha-pengusaha dari berbagai negara dapat saling berdiskusi bertukar pikiran dan memperluas jaringan bisnis satu sama lain. Selain itu, pada forum ini juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi bersama, Mentri Retno mengatakan:

"Kedua, meningkatkan saling pengertian sebagai sesama negara kepulauan yang memiliki latar belakang budaya dan tantangan yang sama antara lain isu perubahan iklim, isu-isu kemaritiman, dan pengembangan wilayah pesisir".[14]

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengklaim bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 terdapat sebanyak 1.645 peserta yang berasal dari kawasan Pasifik Selatan telah berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Indonesia. Untuk Fiji saja, sepanjang 2014-2017 sudah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas sebanyak 41 pelatihan. Dari sini dapat dilihat peningkatan bantuan peningkatan kapasitas yang diberikan pemerintah Indonesia kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi negara-negara di Pasifik Selatan yang terkena bencana alam, misalnya saja bantuan yang diberikan oleh pemerintsh Indonesia kepada Fiji dan Vanuatu yang terkena bencana alam badai topan pada 2015 dan 2016.

DIPLOMASI BUDAYA

Kesamaan budaya Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan yaitu budaya Melanesia menyebabkan adanya kesamaan kepentingan untuk mempromosikan kebudayaan tersebut kepada dunia. Dengan hal ini maka Indonesia melakukan banyak kerjasama di bidang budaya dengan negara-negara Pasifik Selatan. Ada banyak

[13] "Diplomasi Tangan Di Atas: Indonesia Aid, Waktunya Indonesia Makin Berkontribusi Pada Dunia" Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 25 September 2021 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/diplomasi-tangan-di-atas-indonesia-aid-waktunya-indonesia-makin-berkontribusi-pada-dunia/

[14] Rehia Indrayanti Beru Sebayang, "RI Genjot Kehadiran di Pasifik Selatan Melalui ISPF" CNBC Indonesia 21 Maret 2019 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190321135224-4-62089/ri-genjot-kehadiran-di-pasifik-selatan-melalui-ispf

kerjasama bidang kebudayaan yang dilakukan Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan, salah satunya yaitu program Indonesia dalam kerja sama pendidikan dan kebudayaan yaitu Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI).

Pada 27-29 Oktober 2015, Pemerintah Indonesia mengadakan Festival Budaya Melanesia di Kupang, NTT. Pada tahun 2018 negara-negara Melanesia menyelenggarakan Melanesian Arts and Cultural Festival (MACFest) 6th di Honiara, Kepulauan Solomon.[15] Festival budaya yang dilakukan untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Melanesia kepada anak-anak muda serta adanya interaksi budaya dari masing-masing negara yang terlibat.

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan sebuah forum yang diinisiasi oleh Indonesia sebagai forum sharing experience bagi negara-negara yang sedang mengembangkan sistem demokrasi. Dalam BDF turut diundang negara-negara Pasifik Selatan serta organisasi regional Pasifik Selatan yaitu MSG. BDF telah menjadi elemen diplomasi public Indonesia guna memperbaiki citra negative Indonesia. Selain itu, salah satu langkah Indonesia memperbaiki citra Indonesia yaitu dengan menyelenggarakan program *Journalist Visit Programme* (JVP) yaitu program kunjungan jurnalis dari mancanegara ke Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Beberapa topik dibahas dalam program ini seperti infrastruktur, pembangunan, industry kreatif dan lainnya.[16] Dengan adanya acara ini diharapkan setelah acara selesai mereka akan mempublikasikan hal-hal positif yang mereka dapat di Indonesia.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI JOKOWI SEBAGAI TINDAKAN ADAPTIF

Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Jokowi merupakan sebuah sikap yang diambil akibat adanya kondisi eksternal yang berpengaruh kepada struktur esensial Indonesia. Kondisi ini memaksa Jokowi untuk mengambil langkah kebijakan luar negeri sebagai respon dari situasi eksternal yang terjadi. Hal ini disebut Rosenau sebagai *The Adaptive Model* atau Tindakan Adaptif.

The Adaptive Model merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal agar tidak merubah struktur esensial

[15] Philip Lilomo, "Sicci Applauds Successful Macfest" Sicci, 11 Juli 2018 https://www.solomonchamber.com.sb/news-reports/posts/2018/july/sicci-applauds-successful-macfest/

[16] Floranesia Lantang & Tambunan EMB "The Internalization of "West Papua" Issue and Its Impact on Indonesia's Policy to the South Pacific Region", *Journal of ASEAN Studies* (2020) Vol 8 no. 1 hlm. 51

negara. Struktur esensial negara adalah hal-hal penting yang menjadi dasar sebuah negara dan masyarakat yaitu pemerintahan, keadaan ekonomi dan politik serta struktur sosial masyarakat.[17] Perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkup internal maupun eksternal dapat mempengaruhi stuktur esensial sebuah negara. Oleh karena itu negara harus membuat sebuah kebijakan yang beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar meminimalisir ancaman yang ada.

Pada tahun 2013 terjadi pergantian PM Vanuatu Sato Kilman yang cukup dekat dengan pemerintah Indonesia berganti dengan PM Moana Carcases Kalosil yang mendukung kelompok separatism. Hal yang sama juga terjadi pada Kepulauan Solomon, pergantian PM Kepulauan Solomon, Gordon Darcy yang menjalin hubungan erat dengan Indonesia digantikan oleh PM baru Manasseh Sogavare yang memiliki solidaritas Melanesia yang tinggi dan mendukung kemerdekaan Papua Barat.[18] Hal ini tentunya mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan Indonesia, perubahan pemimpin suatu negara akan berakibat pada perubahan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tersebut.

Perubahan-perubahan yang terjadi di Pasifik Selatan merupakan perubahan eksternal yang mempengaruhi struktur esensial Indonesia. Perubahan ini terjadi pada masa Jokowi, sehingga ia harus menerapkan langkah adaptasi perubahan kebijakan luar negeri menyesuaikan perubahan tersebut. Pola yang dilakukan oleh Jokowi termasuk kedalam pola perubahan kebijakan luar negeri *Acquiscent Adaptation*, dimana Jokowi melakukan tindakan adaptif dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk mendekati negera-negara Pasifik Selatan sebagai respon dari perubahan politik yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan. Jokowi mengambil tindakan ini sebagai perilaku adaptif guna melindungi kepentingan nasional Indonesia yaitu mengamankan territorial Indonesia.

Kebijakan Melihat ke Timur merupakan konsep kebijakan luar negeri yang dibuat pada pemerintahan SBY. Kebijakan ini diambil oleh SBY karena menyadari pentingnya kawasan Pasifik Selatan dalam geopolitik Indonesia. Namun kebijakan ini baru terlaksana di ujung masa pemerintahannya.

Dari data yang telah didapat, kebijakan Melihat ke Timur yang dilakukan pemerintahan Jokowi

[17] James N Rosenau, 1970. "Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model", *Comparative Politics*, 2(3) hlm. 36

[18] Neles Tebay, "Addressing the Papua Issue in the Pacific" *The Jakarta Post*, 5 Maret 2015 https://www.thejakartapost.com/news/2015/03/05/addressing-papua-issue-pacific.html

terlaksana lebih maksimal dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan jumlah kunjungan ke negara-negara Pasifik Selatan yang dilakukan oleh Jokowi lebih banyak dibandingkan SBY. Kerja sama bantuan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Jokowi lebih intens serta menjangkau lebih banyak negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini dapat terjadi karena SBY menjalankan kebijakan melihat ke timur di akhir masa pemerintahannya, sehingga kebijakan ini tidak berjalan maksimal.

Perbedaan situasi dan kondisi eksternal pada pemerintahan SBY dan Jokowi membuat banyak perbedaan dalam kebijakan luar negeri yang diambil. Situasi eksternal yang datang dari Pasifik Selatan pada pemerintahan Jokowi mendesak Jokowi untuk melakukan kebijakan luar negeri yang berfokus mendekati kawasan Pasifik Selatan.

DAMPAK DIPLOMASI JOKOWI DI PASIFIK SELATAN

Direktorat Kerjasama Teknik Indonesia melakukan berbagai program kegiatan promosi dan perluasan jaringan kemitraan kepada kawasan Pasifik Selatan. Hal ini dilakukan dengan mekanisme bilateral maupun bilateral contohnya pemberian bantuan kerjasama melalui KSST dan triangular. Melalui kegiatan ini akan tercipta penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan teknik yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Kerja Sama Teknik Tahun 2019, bantuan kerja sama teknik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mendapat respon 100% positif. [19]

Seluruh peserta yang mengikuti pelatihan kerja sama teknik memberikan respon positif pada kuisioner yang telah diberikan setelah mereka mendapatkan pelatihan pembangunan kapasitas. Berbagai pelatihan peningkatan kapasitas di berbagai bidang merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di kawasan Pasifik Selatan. Dengan banyaknya peserta yang mengikuti program ini maka hubungan people to people contact akan semakin terjalin antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Pasifik Selatan.

Fiji adalah salah satu negara yang mendapat banyak bantuan kerjasama dan pembangunan kapasitas dari Indonesia. Dari tahun 2014 hingga 2019 terhitung sudah 41 kali mendapatkan pelatihan pembangunan kapasitas di berbagai bidang dari pemerintah Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan bencana alam kepada Fiji. Hal ini mendapatkan respon positif dari pemerintah Fiji.

[19] Kementerian Luar Negeri RI, "Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Kerja Sama Teknik", 7 Januari 2020.

Pada pemberian bantuan akibat bencana Topan Harold di Fiji, Menteri Pertanian, Pembangunan Pedesaan & Maritim Fiji, dan Penanggulangan Bencana Nasional, Inia Seruiratu mengucapkan rasa terimakasih kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.[20]

Pada kesempatan penyerahan Surat Kepercayaan Duta Besar LBBP, Duta besar Fiji untuk Indonesia mengatakan bahwa Fiji sudah menganggap Indonesia sebagai saudara besar bagi Fiji, dan ia ingin menguatkan hubungan sebagai negara sahabat dan meningkatkan kerjasama bilateralnya dengan Indonesia. Hal ini adalah salah satu dampak dari diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Hubungan yang sebelumnya tidak terlalu dekat saat ini perlahan dan terus meningkat.

Diplomasi bantuan yang dilakukan Jokowi di kawasan Pasifik Selatan memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Upaya diplomasi tersebut dapat memulihkan citra buruk serta meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan tersebut. Baiq Wardhani menyebutkan bahwa diplomasi bantuan yang dilakukan Indonesia berhasil mengurangi dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terhadap separatisme Papua Barat.[21] Negara-negara yang sebelumnya mendukung kemerdekaan Papua Barat baik secara moral dan diplomatik seperti Tuvalu, Kiribati dan Nauru mengalami perubahan sikap. Namun Vanuatu masih bersikeras mendukung Papua Barat dan menyerang Indonesia di berbagai forum Internasional.

Diplomasi Jokowi terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan belum menampakkan hasil yang terlalu signifikan. Namun diplomasi intensif yang terus dilakukan perlahan menunjukkan hasil. Pendekatan yang dilakukan Jokowi cukup meredakan ketegangan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan. Citra Indonesia perlahan mulai membaik dan hubungan yang lebih harmonis. Dengan upaya diplomasi bantuan yang terus dilakukan Indonesia dapat mengamankan integritas teritorialnya dari ancaman eksternal.

KESIMPULAN

Perbedaan situasi dan kondisi eksternal pada pemerintahan Jokowi dan pemerintahan sebelumnya

[20] Antara New.com "Indonesia extends US$7,500 assistance to cyclone victims in Fiji" 22 April 2020 https://en.antaranews.com/news/146492/indonesia-extends-us7500-assistance-to-cyclone-victims-in-fiji

[21] Baiq Wardhani, "Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?" *The Conversation,* 20 Desember 2020. https://theconversation.com/apa-dampak-diplomasi-bantuan-indonesia-ke-kawasan-pasifik-147283

membuat perbedaan kebijakan luar negeri yang dilakukan. Pada periode kepemimpinan Jokowi, negara-negara Melanesia sangat aktif meyuarakan isu kemerdekaan Papua Barat ke berbagai forum internasional. telah diamatkan dalam UUD 1945. Mereka menginginkan diadakannya referendum untuk rakyat Papua Barat agar menjadi sebuah negara merdeka. Ancaman terhadap keutuhan NKRI nyata terjadi, oleh karena itu presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk mendekati negara-negara di kawasan Pasifik Selatan demi menjaga kedaulatan NKRI. Hal ini disebut Rosenau sebagai tindakan adaptive atau "*The Adaptive Model*". Berdasarkan pengelompokkan perilaku adaptif oleh Rosenau, tindakan Jokowi termasuk ke dalam Acquiscent Adaptation yaitu kebijakan luar negeri yang menyesuaikan dengan perubahan yang bersumber dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Worldbank. Climate Change and Disaster Management. Washington: The World Bank, 2016.Djelantik, Sukawarsini. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kementerian Luar Negeri RI, "Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Kerja Sama Teknik", 7 Januari 2020.

Jurnal

Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional" Jurnal Transnasional. Vol. 5, No. 1, (2013). Hlm. 896-774

Rosenau, James N. "Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model". Comparative Politics. (1970) Vol. 2, No. 3, Hlm. 367-387

Wardhani, Baiq & Vinsensio Dugis, "Interpreting Indonesia's "Look East" Policy: The Security Dimension of Foreign Aid" Issues & Studies Vol. 56 No. 3

Floranesia Lantang & Tambunan EMB "The Internalization of "West Papua" Issue and Its Impact on Indonesia's Policy to the South Pacific Region", Journal of ASEAN Studies (2020) Vol 8

Rosenau, James N. "Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model". Comparative Politics. (1970) Vol. 2, No. 3, Hlm. 367-387

Media Internet

The Jakarta Post. "Rising Sea Levels Threaten 2000 Islands in Indonesia". 17 Desember 2015 http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/17/rising-sea-levels-threaten-2000-islands-indonesia.html

Jemima Garrett, "Papua New Guinea's prime minister Peter O'Neill vows to speak out against Melanesian 'oppression' in West Papua," ABC News,5 Feb 2015 https://www.abc.net.au/news/2015-02-06/png-pm-vows-to-speak-out-against-oppression-in-west-papua/6074572

DW.com "7 Negara Pasifik Desak PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Papua" 02 Maret 2017 https://www.dw.com/id/7-negara-pasifik-desak-pbb-selidiki-pelanggaran-ham-di-papua/a-37777030

"Diplomasi Tangan Di Atas: Indonesia Aid, Waktunya Indonesia Makin Berkontribusi Pada Dunia" Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 25 September 2021 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/diplomasi-tangan-di-atas-indonesia-aid-waktunya-indonesia-makin-berkontribusi-pada-dunia/

Rehia Indrayanti Beru Sebayang, "RI Genjot Kehadiran di Pasifik Selatan Melalui ISPF" CNBC Indonesia 21 Maret 2019 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190321135224-4-62089/ri-genjot-kehadiran-di-pasifik-selatan-melalui-ispf

Philip Lilomo, "Sicci Applauds Successful Macfest" Sicci, 11 Juli 2018 https://www.solomonchamber.com.sb/news-reports/posts/2018/july/sicci-applauds-successful-macfest/

Neles Tebay, "Addressing the Papua Issue in the Pacific" The Jakarta Post, 5 Maret 2015 https://www.thejakartapost.com/news/2015/03/05/addressing-papua-issue-pacific.html

Antara New.com "Indonesia extends US$7,500 assistance to cyclone victims in Fiji" 22 April 2020 https://en.antaranews.com/news/146492/indonesia-extends-us7500-assistance-to-cyclone-victims-in-fiji

Wardhani, Baiq "Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?" The Conversation, 20 Desember 2020. https://theconversation.com/apa-dampak-diplomasi-bantuan-indonesia-ke-kawasan-pasifik-147283

Jemima Garrett, "Papua New Guinea's prime minister Peter O'Neill vows to speak out against Melanesian 'oppression' in West Papua," ABC News,5 Feb 2015 https://www.abc.net.au/news/2015-02-06/png-pm-vows-to-speak-out-against-oppression-in-west-papua/6074572

Melanesian Spearhead Group (MSG)", Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diakses pada 15 September 2021 https://kemlu.go.id/portal/i/read/

128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg

"Excelling Together Towards a Progressive and Prosperous Melanesia" Melanesian Spearhead Group Secretariat, diakses pada 20 Mei 2021 pukul 14.59 https://www.msgsec.info/about-msg/